

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang No 28, 2007). Terdapat dua jenis pendanaan yang dapat di pilih oleh wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu *debt financing* dan *equity financing*. Pendanaan melalui utang lebih menguntungkan, diakibatkan utang merupakan *deductible expense* dan memiliki *cost of capital* yang rendah. Di sisi lain *equity financing* berkorelasi dengan dividen, khususnya dalam sistem klasik dividen dapat dikenakan perpajakan berganda di tingkat perusahaan (PPh badan) dan pemegang saham (pajak atas dividen). Praktik penghindaran pajak melalui pendanaan cabang atau anak perusahaan lebih besar antara utang dari pada modal disebut *thin capitalization*. Praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization* semakin diuntungkan (Tambunan, 2019).

Di Indonesia saat ini memiliki peraturan tentang *thin capitalization* yang berpegang pada pedoman pertama yaitu *arm's length test* yang menentukan berapa jumlah utang untuk entitas yang memiliki hubungan istimewa dan juga *debt to equity* menentukan berapa jumlah utang maksimal didapatkan dan dijumlahkan sebagai biaya (OECD, 2012). Usaha pemerintah dalam meminimalisir skema *thin capitalization* dengan dilakukannya pembentukan peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Peraturan tersebut berisi terkait penjelasan besarnya perbandingan modal sendiri dengan utang, yang dimana perbedaan perbandingan utang ditetapkan setinggi – tingginya empat banding satu (4:1) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Penghindaran pajak merupakan skema *thin capitalization* yang berada di Indonesia dilakukannya perusahaan dengan memenuhi usaha dalam membayar hutang yang tinggi untuk pengalihan modal. Hal tersebut dapat memungkinkan

karena munculnya peraturan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi Pajak Penghasilan, pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 3, bunga biaya merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak di tingkat perusahaan.

Skema *thin capitalization* dilakukan pada saat jumlah utang relatif lebih tinggi dari pada ekuitas (*Organisation for Economic Cooperation and Development*, 2012). Skema *thin capitalization* ini yang membuat salah satu indikasi adanya *tax avoidance* oleh sebuah perusahaan. Jika perusahaan melakukan modal yang dipilih dari pembiayaan, konsekuensi dari perusahaan ialah dengan membagikan dividen, yang dimana dividen tersebut dikenakan biaya pajak. Ketika perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan menjaminkan modal suntikan pemegang saham atau juga dengan menjamin pinjaman maupun utang maka perusahaan lebih memilih modal dari pembiayaan, yang didapatkan dari objek pajak akan sama ialah dikenakan dua kali lipat terhadap pajak, yang pertama terhadap perhitungan beban pajak penghasilan perusahaan, dan kedua saat terjadi pembagian dividen. Ketika perusahaan memilih pembiayaan dari utang, akan terjadi konsekuensi yaitu beban bunga. Disatu sisi, dividen merupakan *non-deductible*, sedangkan bunga bisa dikurangi laba artinya *deductible*. Terjadinya hal ini membuat timbulnya risiko masalah dalam otoritas pajak, karena dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pemilihan terhadap pembiayaan yang tinggi utang sebagian dari dasar penghindaran pajak. Kerugian yang didapatkan dari penerimaan pajak ialah dengan mengurangi pajak tersebut tingkat utang yang sangat tinggi telah memberikan banyak negara maju untuk melakukan *thin capitalization rules* sehingga melindungi penggunaan dasar pajak yang ada dalam negara mereka sendiri.

Terdapat teori keagenan, ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal. Agen disini Wajib Pajak sedangkan prinsipal otoritas pajak. Bagi Wajib Pajak sendiri pajak merupakan laba yang diterima selanjutnya dikurangi dan tidak mendapatkan nilai tambah sedangkan otoritas pajak ialah sumber dari salah satu pendapatan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Timbul perbedaan kepentingan mencerminkan

sikap dari agen yang melakukan tindakan untuk menurunkan laba dengan memaksimalkan beban, termasuk beban pajak. Untuk prinsipal melakukan tindakan dengan mendapatkan setinggi – tingginya penerimaan negara untuk melakukan pembiayaan operasional negara. Melakukan penurunan beban pajak bisa jadi dilakukannya menggunakan skema *thin capitalization* caranya dengan melakukan pemanfaatan terhadap perbedaan untuk dilakukannya perpajakan antara lain utang dan dividen, pajak tidak memberikan imbalan langsung terhadap Wajib Pajak, ini yang menyebabkan mengapa Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Berkenan dengan hal itu keputusan dari banyak negara untuk melakukan pembuatan peraturan yang mengatur tentang *thin capitalization* yang disebut dengan *thin capitalization rules* (Whidyawhati dan Sari, 2021).

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan cara agar diperbaikinya sistem pajak untuk lebih baik sehingga terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak. Dengan cara memberikan kemandirian pemerintah Indonesia dalam membiayai aset serta pembangunan negara dengan cara membuka sumber dana dari pajak itu sendiri. Jika dilakukan penerimaan pajak akan memiliki kendala yang cukup besar kendala yang muncul ialah penghindaran pajak dari perusahaan serta segala sesuatu yang dilakukan sehingga mengurangi biaya pajak kepada pemerintah dalam penerimaan pajak. *Thin capitalization* merupakan cara untuk pembentukan modal struktur perusahaan dengan melakukan kerja sama kepemilikan hutang kecil maupun besar. Perusahaan sendiri dapat dengan mudah mengurangi beban bunga dengan hasil kena pajak yang rendah. Sehingga pengurangan itu membuat faktor makro berkurang untuk mendapatkan pendapatan dari pajak negara.

Skema *thin capitalization* merupakan biaya suatu cabang yang berada dalam anak perusahaan dan mendapatkan pemanfaatan pajak dari utang bunga perusahaan dan mempunyai modal saham serta hubungan istimewa yang besar. Sehingga hutang tersebut dianggap sebagai salah satu modal yang disetorkan serta anak perusahaan membayarkan bunga kepada induk perusahaan dan tidak dilaporkan sebagai dividen. Setelah dilakukan dihasilkan pajak yang dibebaskan dari sebuah perusahaan yang melakukan *thin capitalization*.

Risiko yang didapatkan ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah denda, bunga dan reputasi perusahaan yang berdampak buruk bagi perusahaan (Amstron dan David, 2012). Pihak perusahaan tidak melihat dari satu sisi saja dan pihak perusahaan akan melihat dari sisi perusahaan apakah berdampak baik buat perusahaan atau buruk jika baik mereka lanjutkan dengan menggunakan *thin capitalization*. Jika perusahaan tersebut melakukan penggunaan utang yang berlebihan sampai melewati batas yang telah ditetapkan akan dilakukan pinjaman biaya yang dihitung sebagai pengurangan penghasilan kena pajak ialah senilai yang diperbandingkan telah ditetapkan dalam PMK 169 tersebut. Faktor yang tertinggi dari tarif pajak tersebut ialah dengan menetapkan salah satu penyebab yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk Wajib Pajak. Seolah Wajib Pajak tersebut tertantang akan mengurangi tarif pajak yang cukup tinggi. Dengan adanya *thin capitalization* dapat mengurangi beban bunga yang ada dalam perusahaan dengan menghasilkan kena pajak yang lebih rendah, akibat dari pengurangan kena pajak terjadinya berkurangnya pendapatan negara yang didapatkan dari pajak.

Meningkatnya ekonomi yang sangat pesat membawahi transaksi menuju internasional atau *cross border transaction*. Dilakukannya *cross border transaction* membutuhkan kerjasama yang baik antara negara dengan negara yang lain dibidang ekonomi, politik dan sosial bahkan dalam perkembangan pendidikan yang sudah kompleks dibutuhkan untuk menambah wawasan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini menyebabkan negara membutuhkan kerjasama dengan negara yang lain dibidang ekonomi maupun politik, akan sulit jika negara tanpa politik dan sosial disebabkan keduanya sangat bergantung untuk kehidupan kesejahteraan negara.

Perlakuan perpajakan diberbagai negara banyak melakukan penghindaran pajak yang diperkenankan atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (Pramesthi dkk., 2019). Pandangan tentang perlakuan pajak diberbagai negara bisa jadi berbeda tentang apa yang dikategorikan penghindaran pajak yang diperkenankan atau penghindaran pajak tidak diperkenankan. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan

pajaknya. Bergabungnya perusahaan Indonesia dalam wilayah *tax haven* bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, khususnya bagi yang sengaja melakukan penghindaran pajak atas negara asalnya. Modelnya pemilik perusahaan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Model ini terdapat masalah yang dapat merugikan negara, pajaknya ketika dinyatakan utang terdapat bunga, bunga tersebut yang dapat mengurangi profit yang dapat mengurangi pajak, bunga utang yang harus dibayarkan bisa menjadi penggelapan pajak atas dividen, seakan sudah membayar bunga akan tetapi sebenarnya dividen. Peraturan pemanfaatan *tax haven* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.458/PMK.03/2008. Namun belum terdapat peraturan yang jelas mengenai pelarangan atau pembuatan anak perusahaan di negara *tax haven* sehingga mempermudah pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis dengan mitra negara lain

Perbedaan dalam perlakuan pajak membuat Wajib Pajak dapat memilih bentuk perencanaan pajak berupa mengandalkan utang atau pinjaman, disebabkan mengandalkan utang dapat mengurangi pajak. Bunga atas utang tersebut dapat mengurangi PPh badan dan tidak membayar PPh atas dividen, sehingga dengan dilakukan pemanfaatan *tax haven* dapat mencapai keuntungan yang didapatkan dari perusahaan. Pemanfaatan *tax haven* mengungkapkan bahwa yang tergabung dalam anak perusahaan tersebut bisa saja sah dan semata-mata tidak digunakan dalam kontribusi penghindaran pajak tersebut, akan tetapi untuk meningkatkan bantuan yang didapatkan dari perusahaan setelah pajak.

Pemanfaatan *tax haven* hal yang penting untuk meminimalisir kurangnya pajak yang ada dalam perusahaan, akan tetapi hal itu dilakukan dalam pengawasan yang ketat dilakukan oleh otoritas pajak nasional dan juga global. Kurangnya pengawasan penerimaan pajak akan menyebabkan terjadinya Wajib Pajak yang menghindar dalam membayar pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019). *Tax haven countries*, menurut *Organization for Economic Cooperation and Development*, 2012). Merupakan negara – negara yang memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak negara lain agar penghasilan Wajib Pajak tersebut dapat diarahkan ke negara – negara *tax haven*. Keuntungan pemanfaatan *tax haven* dalam melakukan pencapaian diberbagai faktor antara lain mendapatkan

kelonggaran kepada wajib pajak dalam membayar pajak lebih rendah. Pihak investor yang memanfaatkan pemanfaatan *tax haven* mendapatkan keuntungan dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain memanfaatkan utang di dalam struktur pendanaan perusahaan, perusahaan akan memilih pendanaan melalui penyertaan modal. Terkait utang tersebut, biaya bunga dibayarkan sebagai imbalan kepada kreditur, sedangkan ekuitas dividen tersebut dibagikan sebagai imbalan kepada pemegang saham. Menurut undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 23 ayat (1) huruf a, dividen merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Jika dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, maka tarif PPh yang berlaku mengikuti PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Negara yang tidak mengenakan pajak atas dividen, pajak yang dikenakan atas dividen ialah penyertaan modal dari luar negeri yang tergolong besar, namun disisi lain keberadaan pemanfaatan *tax haven* dapat mengganggu reputasi perusahaan apabila tujuannya untuk pengalihan modal sehingga (Suripto, 2020) berpendapat bahwa *tax haven* tidak mempengaruhi *thin capitalization*. Namun (Nugraha dan Kristanto, 2019) mengatakan bahwa *tax haven* mempengaruhi *thin capitalization*.

Kualitas audit merupakan sejauh mana auditor mampu melaporkan informasi dengan tepat dengan standar yang berlaku (Yadiati dan Mubarak, 2017). Kualitas audit kemungkinan dari segala yang didapatkan saat terjadinya auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan kesalahan atau pelanggaran yang muncul setelah dibuatnya laporan keuangan audit. Melakukan prosedur audit dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, yang dapat dilakukan lewat strategi *thin capitalization*. Dalam melakukan pengauditan, diminta perusahaan melakukan transparan dalam melaporkan laporan keuangan yang didalamnya terdapat beban pajak. Transparan yang dilakukan ialah dengan melaporkan terhadap pemegang saham terkait perpajakan. Dilakukannya transparan terhadap pemegang saham dalam hal pajak merupakan salah satu tuntutan dari otoritas publik. Audit juga merupakan sumber dari upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dengan

dilakukannya pemilihan auditor yang berkualitas. Kualitas audit disini merupakan sumber utama yang harus dipertimbangkan untuk memilih auditor.

Pada dasarnya audit merupakan suatu alat yang dimana seorang harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk menjaga mutu kondisi ataupun status tertentu yang dijamin dalam melakukan pengujian. Auditor sendiri melakukannya dengan mandiri dan sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan Wajib Pajak. Kantor akuntan publik atau KAP yang memiliki ukuran reputasi lebih besar disebut *Big 4* cenderung menjaga nama baik mereka dengan tidak memiliki ketergantungan terhadap klien sehingga diyakini dapat menghilangkan tekanan dari klien mereka dibandingkan dengan KAP selain *Big 4* (Husain dan Alang, 2019). Fakta tersebut dijadikan sebagai pengukuran untuk menilai kualitas audit yang dilakukan oleh auditor karena sifatnya yang lebih independen maka secara teoritis auditor cenderung mengeluarkan *going concern*. Oleh sebab itu auditor diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam perhitungan pajak yang dibuat oleh perusahaan agar menghindarinya tindakan penghindaran pajak. (Whidyawhati dan Sari, 2021) berpendapat bahwa kualitas audit mempengaruhi *thin capitalization*.

Pertumbuhan penjualan dapat menentukan keberhasilan dari investasi pada periode masa lalu maupun yang mendatang (Hidayat, 2018). Perusahaan dengan penjualan yang besar dapat dengan stabil memperoleh pinjaman dan juga menanggung beban tinggi terhadap perusahaan. Dapat dilihat dari peluang bisnis dengan cara melihat pertumbuhan penjualan yang tersedia dipasar dan diambil alih oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh yang cukup strategi terhadap perusahaan, dikarenakan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sebaiknya didukung dengan harta maupun aset jika penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan yang dapat mengoptimalkan faktor yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Tujuan penelitian dalam memilih pengukuran pertumbuhan penjualan dikarenakan dapat mengetahui baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan dalam perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi berapa besar kecil suatu profit yang didapatkan dengan jumlah besarnya pertumbuhan penjualan.

Peningkatan pertumbuhan penjualan bisa dengan mudah mendapatkan laba yang besar sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah melakukan *thin capitalization*. (Oktamawati, 2019) berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Di sisi lain, belum ada penelitian yang meneliti tentang pengaruh kualitas audit sebagai variabel independen terhadap *thin capitalization* secara khusus.

Penelitian memilih skema *thin capitalization* disebabkan karena skema ini bisa mendapatkan titik celah dalam melakukan perbedaan perpajakan, sehingga peneliti tertarik dalam melakukan penelitian. Banyak juga yang melakukan penelitian hanya berfokus pada *tax avoidance* bukan pada berfokus pada *thin capitalization* dan juga masih kurang dilakukan penelitian terhadap *thin capitalization*. Hal tersebut membuat peneliti tergerak dalam melakukan penelitian tentang pengaruh *tax haven*, kualitas audit dan pertumbuhan penjualan terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 (selama 5 tahun) supaya hasil penelitian ini dapat lebih relevan. Pertimbangan dalam memilih obyek perusahaan manufaktur disebabkan adanya sektor penghasil bahan baku terdapat sub sektor pertambangan sedangkan untuk sektor jasa adanya sub sektor infrastruktur utilitas, transportasi dan keuangan dimana ketiganya merupakan Wajib Pajak yang dikecualikan dari PMK 169/PMK.010/2015 Whidyawhati dan Sari (2021).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 2 Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 3 Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *thin capitalization*

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *thin capitalization* perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi dalam bidang akademis, menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian yang selanjutnya mengenai *thin capitalization* dan memberikan kontribusi referensi tambahan mengenai Pengaruh pemanfaatan *tax haven*, kualitas audit dan pertumbuhan penjualan terhadap *thin capitalization*
2. Manfaatn Praktis
Bagi (Direktorat Jenderal Pajak) membuat penelitian ini menjadi pengetahuan *thin capitalization rules* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini menjelaskan tentang masalah latar belakang, perumusan masalah yang terakut dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematis penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab 2 ini membahas teori dalam rangkuman penelitian hipotesis yang diajukan serta kerangka dari penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data, populasi sampel dalam penelitian.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 ini membahas gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan hasil analisis data serta pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab 5 ini menjelaskan simpulan, keterbatasan dan saran penelitian yang berguna bagi peneliti selanjutnya.